

BAB III

AGRESIVITAS CINA DI PERBATASAN FILIPINA

China adalah negara terbesar ketiga di dunia yang mendominasi peta Asia Timur dengan luas 9,6 juta kilometer persegi (3,7 juta mil persegi) dan memiliki populasi sebesar 1,3 miliar. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua, Cina sangat berpengaruh dalam pembangunan dan ekonomi global dan menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan dunia sejak krisis keuangan global pada tahun 2008. Hal tersebut menjadikan Cina sebagai kekuatan baru dalam konstelasi politik global yang disebabkan oleh meningkatnya kekuatan Cina baik dalam ekonomi, diplomatik dan keamanan. Kekuatan baru ini membuat Cina lebih tegas dalam aspek global.

Hal tersebut mempengaruhi perilaku agresif Cina dalam sistem internasional sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin besar dalam menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi dan kepentingan nasionalnya. Salah satu perilaku agresif Cina adalah klaim Laut Cina Selatan. Klaim tersebut berpengaruh terhadap negara-negara yang lain yang juga bersengketa atas Laut Cina Selatan misalnya seperti Filipina. Filipina merupakan negara yang terancam keamanan maritimnya oleh keagresifan Cina di perbatasan Filipina.

Filipina berada di bagian barat Samudra Pasifik yang memiliki sekitar 7.107 pulau. Berdasarkan luas permukaan, Filipina merupakan negara terbesar ke-73 di dunia dan memiliki populasi sekitar 104 juta orang yang menjadikan negara ini menjadi negara dengan jumlah penduduk terpadat ketujuh di Asia dan ke-12 di dunia. Filipina berada di sebelah Tenggara Cina yang dipisahkan oleh lautan yang berjarak sekitar 3.096 dari Cina. Filipina merupakan negara koloni

Spanyol yang kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat pada awal abad ke 20. Pengaruh Spanyol dan Amerika Serikat cukup kuat dalam bahasa, agama dan pemerintahan. Selain itu, Amerika Serikat adalah sekutu dekat yang berperan penting dalam keamanan di Filipina.

Cina dan Filipina mulai menjalin hubungan diplomatik pada 9 Juni 1975. Pada umumnya, Cina dan Filipina melakukan banyak kerja sama bilateral di berbagai bidang. Namun, kedua negara mempunyai perselisihan mengenai kedaulatan beberapa pulau dan wilayah perairan di Laut Cina Selatan.⁴⁷ Kekuatan militer Cina yang terus berkembang juga menciptakan ketegangan di wilayah perairan ini yang diperburuk dengan klaim nine dash line oleh Cina. Bahkan dengan adanya Konvensi PBB tentang hukum laut yang mengikat, tidak membuat Cina meredam keinginannya dalam melakukan klaim yang tidak sesuai dengan hukum tersebut.

A. Pelanggaran Cina atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut merupakan sebuah hukum dan peraturan komprehensif di lautan yang menetapkan peraturan yang mengatur semua penggunaan laut dan sumber dayanya. Ini mengabadikan gagasan bahwa semua masalah ruang laut saling terkait erat dan perlu ditangani secara keseluruhan.

Setelah melalui perundingan yang cukup panjang , negara-negara peserta Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 pada akhirnya telah menyepakati Konvensi PBB tentang Hukum

⁴⁷ Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines, "*Overview of China-Philippines Bilateral Relations*" dalam <http://ph.china-embassy.org/eng/zfgx/zzgx/t180703.htm> , diakses pada 21 Febuari 2018.

Laut.⁴⁸ Konvensi ini dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika yang melibatkan partisipasi lebih dari 150 negara yang mewakili wilayah di seluruh dunia. Konvensi ini terkandung dalam satu instrumen peraturan tradisional tentang penggunaan lautan dan memperkenalkan konsep dan rezim hukum baru. Pada tanggal 16 November 1994, konvensi ini mulai berlaku dan diakui secara global atas semua hal yang berkaitan dengan hukum laut. Konvensi ini terdiri dari 320 artikel dan sembilan lampiran yang mengatur semua aspek ruang laut, seperti delimitasi, kegiatan ekonomi dan komersial, penelitian ilmiah kelautan, pengendalian lingkungan, alih teknologi, dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah laut.⁴⁹

Beberapa hal utama dari konvensi ini diantaranya adalah negara-negara pantai menjalankan kedaulatan atas laut teritorial sehingga memiliki hak untuk menetapkan luasnya sampai batas yang tidak melebihi 12 mil laut, kapal dan pesawat terbang dari semua negara diizinkan menggunakan “jalur transit” melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional, negara-negara yang terhubung dengan pantai memiliki hak berdaulat 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif sehubungan dengan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi tertentu, semua negara memiliki kebebasan navigasi dan *overflight* di zona ekonomi eksklusif serta kebebasan untuk meletakkan kabel kapal selam dan jaringan pipa, sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut yang ditetapkan berdasarkan konvensi ke Mahkamah Internasional atau arbitrase. negara-negara terikat untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran laut dan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, “*Pengantar Hukum Internasional*”, P.T. Alumnus, Bandung, 2010, hlm.171.

⁴⁹ Oceans & Law of the Sea United Nations “*United Nation Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*” dalam http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm , diakses pada 25 Febuari 2018.

pelanggaran kewajiban internasional mereka untuk memberantas pencemaran tersebut.⁵⁰

Konsep zona ekonomi eksklusif merupakan sebuah konsep baru yang tidak dikenal dalam hukum internasional sebelumnya.⁵¹ Konsep ini dianggap sebagai suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikian rupa pengaturan atas laut. Jauh sebelum adanya konsep ini, batas terluar laut teritorial dianggap sebagai batas antara bagian laut ke arah darat tempat berlaku kedaulatan penuh negara pantai, dan bagian laut ke arah luar dari batas tersebut tempat berlaku kebebasan di laut lepas.⁵²

Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa pada jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya yang dinamakan zona ekonomi eksklusif, suatu negara mempunyai hak-hak berdaulat dan yuridiksi khusus untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berada pada jalur tersebut, termasuk pada dasar laut dan tanah dibawahnya. Batas terluar zona ekonomi eksklusif ini tidak boleh melebihi 200 mil laut, diukur dari garis pangkal yang sama yang dipakai untuk mengukur lebar laut teritorial. Hak-hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis (*economic utilization*) dari bagian laut tersebut, dengan jenis-jenis kegiatan yang dirinci sedemikian rupa meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan manajemen sumber daya alam.⁵³ Di zona ekonomi eksklusif, negara pantai juga memiliki hak-hak berdaulat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu, seperti misalnya produksi energi dan air, arus dan angin, serta yuridiksi untuk pembuatan

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, Op. Cit. Hlm.180

⁵² Ibid. Hlm.181

⁵³ Ibid. Hlm.182

instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.⁵⁴

Konvensi tersebut ditanda tangani oleh lebih dari 150 negara.⁵⁵ Dibutuhkan waktu sembilan tahun untuk menyelesaikan konferensi PBB yang dimulai dari tahun 1973 hingga akhirnya disetujui UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini merupakan negosiasi multilateral pertama Cina setelah bergabung dengan PBB pada tahun 1971.⁵⁶

Pada tahun 1996, Cina telah meratifikasi konvensi tersebut dan pada saat yang sama membuat pernyataan berikut: 1) Sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, Republik Rakyat Cina akan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas zona ekonomi eksklusif 200 mil laut dan landas kontinen; 2) Republik Rakyat Cina akan berpengaruh, melalui konsultasi, pembatasan batas yurisdiksi maritim dengan Negara-negara dengan pantai-pantai yang berlawanan atau berdekatan dengan Cina masing-masing atas dasar hukum internasional dan sesuai dengan prinsip kesetaraan; 3) Republik Rakyat Cina menegaskan kembali kedaulatannya atas semua kepulauannya sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Rakyat Cina di wilayah laut dan zona bersebelahan, yang diumumkan pada tanggal 25 Februari 1992; 4) Republik Rakyat Cina menegaskan kembali bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengenai jalan yang tidak bersalah melalui laut teritorial tidak akan mengurangi hak negara pantai untuk meminta,

⁵⁴ Ibid. Hlm.183

⁵⁵ United Nations Treaty Collection, “*Law of the Sea*” dalam https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxi-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=en , diakses pada 26 Februari 2018.

⁵⁶ Zheng Wang, “*China and UNCLOS: An Inconvenient History*” dalam <https://thediplomat.com/2016/07/china-and-unclos-an-inconvenient-history/> , diakses pada 26 Februari 2018.

sesuai dengan peraturan perundang-undangnya, sebuah negara asing perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu atau memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada negara pantai untuk berlakunya kapal perangnya melalui laut teritorial negara pantai. Pada 25 Agustus 2006, Cina menyampaikan Deklarasi berdasarkan pasal 298 bahwa Pemerintah Republik Rakyat Cina tidak menerima semua prosedur yang diatur dalam Bagian 2 dari Bagian XV Konvensi sehubungan dengan semua kategori perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (a) (b) dan (c) dari Pasal 298.⁵⁷

Pasal 298 Konvensi PBB tentang Hukum Laut berisi tentang kategori perselisihan. Pada ayat 1 disebutkan bahwa saat menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi konvensi ini atau waktu setelah itu, sebuah negara dapat tanpa mengurangi kewajiban yang timbul di bawah bagian 1, menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak menerima satu atau lebih dari prosedur yang diatur dalam bagian 2 berkenaan dengan satu atau lebih dari kategori sengketa berikut:

- a) (i) perselisihan mengenai interpretasi atau penerapan pasal 15, 74 dan 83 yang berkaitan dengan batas laut delimitations, asalkan sebuah negara telah membuat pernyataan semacam itu. Jika terjadi perselisihan seperti itu setelah masuk mulai berlaku konvensi ini dan tidak ada persetujuan dalam jangka waktu yang wajar tercapai negosiasi antara para pihak, atas permintaan apapun berpihak pada perselisihan, menerima pengajuan masalah tersebut ke konsiliasi berdasarkan Lampiran V, bagian 2; dan selanjutnya bahwa setiap perselisihan yang harus melibatkan pertimbangan bersamaan dari setiap perselisihan yang belum diselesaikan tentang kedaulatan atau hak

⁵⁷ United Nation, “*Declaration and Statements*” dalam http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm , diakses pada 26 Febuari 2018.

lainnya atas kontinental atau wilayah tanah sempit harus dikecualikan dari hal tersebut pengajuan;

(ii) setelah komisi konsiliasi mempresentasikan laporannya, yang harus menyatakan alasan yang mendasarinya, pihak harus menegosiasikan kesepakatan atas dasar itu dan melaporkan; Jika negosiasi ini tidak menghasilkan kesepakatan, Para pihak harus, dengan persetujuan bersama, mengajukan pertanyaan ke salah satu prosedur yang diatur dalam bagian 2, kecuali jika pihak-pihak lain setuju;

(iii) sub-ayat ini tidak berlaku untuk batas laut manapun. Perselisihan akhirnya diselesaikan dengan pengaturan antara pihak, atau perselisihan semacam itu yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan bilateral atau multilateral mengikat pihak-pihak tersebut;

b) perselisihan mengenai kegiatan militer, termasuk kegiatan militer oleh kapal pemerintah dan pesawat terbang yang terlibat layanan nonkomersial, dan perselisihan mengenai hukum kegiatan penegakan hukum sehubungan dengan pelaksanaan hak berdaulat atau yurisdiksi kecuali dari yurisdiksi pengadilan atau tribunal berdasarkan pasal 297, paragraf 2 atau 3;

c) perselisihan sehubungan dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa menjalankan fungsi yang ditugaskan kepadanya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali Dewan Keamanan memutuskan untuk melepaskan masalah ini dari agendanya atau serahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan dengan cara yang disediakan dalam Konvensi ini.⁵⁸

Pada tahun 2009, Cina mengumumkan klaim nine dash line yang berupa sebagian besar wilayah perairan di Laut

58

UNCLOS, dalam www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, diakses pada 26 Februari 2017.

Cina selatan beserta Dangkan Scarborough, Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Klaim ini tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Laut PBB yang telah disepakati Cina. Wilayah klaim Cina tersebut melebihi ketentuan 200 mil menurut Hukum Laut PBB yang lebih tepatnya berjarak lebih dari 1000 mil dari Cina. Secara geografis, ketentuan 200 mil yang disepakati di UNCLOS memang tidak menguntungkan Cina. Karena meskipun Cina berbatasan dengan empat lautan (Laut Bohai, Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Laut Cina Selatan), semuanya tertutup oleh negara-negara kepulauan yang membuat Cina harus berbagi ruang maritimnya dengan negara lain.⁵⁹ Karena hal ini, persengketaan Laut Cina Selatan dan UNCLOS menjadi sebuah dilema bagi Cina terutama dalam hal gugatan arbitrase yang dibawa oleh Filipina atas sikap keagresifan Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif Filipina.

Filipina mengklaim Dangkan Scarborough dan Kepulauan Spratly sebagai bagian dari wilayahnya. Filipina menyebut wilayah tersebut sebagai Laut Filipina Barat yang terletak lebih dari 100 mil dari Filipina dan berjarak lebih dari 1000 mil dari Cina. Secara Hukum Laut PBB, Filipina dibenarkan dalam mengklaim wilayahnya yang mana “sebuah negara pesisir perlu memiliki tanah sebelum dapat mengklaim hak atas laut”. Klaim Cina tidak dibenarkan karena tidak ada gumpalan pulau dan bebatuan yang cukup besar untuk menghasilkan batas laut yang membentang lebih dari 2 juta kilometer persegi dari Cina.⁶⁰ Selain negara-negara yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan, Amerika Serikat juga menyatakan keberatan atas klaim *nine dash line* yang dikeluarkan oleh Cina.

⁵⁹ Zheng Wang, Loc. Cit.

⁶⁰ Atty. Aurora A. Santiago, “*Tribunal Ruled in Favor of the Philippines*” dalam <http://www.cbcnews.com/cbcnews/?p=81445> , diakses pada 26 Febuari 2018.

B. Peningkatan Kekuatan Militer Cina

Setelah mengeluarkan klaim *nine dash line*, Cina mulai meningkatkan kekuatan militernya. Cina mulai melakukan modernisasi substansial dari pasukan paramiliter maritim serta kemampuan angkatan lautnya untuk menegakkan klaim yuridiksinya dengan kekuatan militer apabila memang diperlukan.⁶¹

Pada 2010, Cina berada di urutan kedua dalam daftar pengeluaran militer global yang dirilis oleh Lembaga Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI). Pada tahun 2010 ini, pengeluaran global diperkirakan mencapai \$ 1,630 miliar yang meningkat 1,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Dalam daftar ini, Amerika Serikat berada dalam posisi pertama dengan bagiannya dari pengeluaran militer global yang meningkat menjadi 43 persen, diikuti oleh Cina di urutan kedua dengan 7 persen, lalu oleh Inggris, Perancis dan Rusia dengan 4 persen. Pengeluaran militer Cina memang terbilang masih jauh dibandingkan Amerika Serikat, meskipun Cina dikatakan negara yang menjadi tuan rumah bagi tentara terbesar dunia, dengan sebanyak 2,25 juta tentara aktif. Namun, selama 20 tahun terakhir, pembelanjaan pertahanan tahunan China diperkirakan terus meningkat.⁶²

Sejak 2010, anggaran Cina meningkat dua digit setiap tahunnya ketika pembelanjaan Amerika Serikat mulai mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2011, pemerintah mengumumkan peningkatan lebih lanjut dalam pengeluaran militer sekitar hampir 13 persen. Saat itu, pengeluaran militer tahunan Cina sekitar 2,2 persen dari PDB.⁶³ Anggaran

⁶¹ Bonnie S. Glasser, "*Armed Clash in the South China Sea*" dalam <https://www.cfr.org/report/armed-clash-south-china-sea> , diakses pada 5 Maret 2018.

⁶² Belinda Helmke, "*China's Military Spending*" dalam <https://thediplomat.com/2011/06/chinas-military-spending/> , diakses pada 5 Maret 2018.

⁶³ Belinda Helmke, Loc. Cit.

pertahanan yang dikeluarkan Cina meningkat 12,7 persen dari anggaran pada tahun 2010 yaitu menjadi \$ 91,5 miliar pada 2011.⁶⁴

Lalu pada 2012, Cina meningkatkan belanja militernya sebesar 11 persen yang untuk pertama kalinya melewati angka \$ 100 miliar. Peningkatan ini dilakukan sebagai upaya Cina dalam menghadapi negara yang terlibat dalam konflik teritori dan karena Amerika Serikat telah mengumunkan strategi poros ke Asia Pasifik. Pembelanjaan pertahanan baru yang digariskan pada sesi awal tahunan Cina membawa anggaran militer resmi menjadi 670 miliar yuan yang setara dengan \$ 106 miliar dan merupakan peningkatan lebih dari \$ 10 miliar pada 2011.⁶⁵

Peningkatan anggaran dua digit selama dua tahun tersebut membantu Cina mengubah militernya menjadi kekuatan yang mampu memproyeksikan kekuatan di seluruh kawasan dan menghadapi zona konflik yang jauh seperti pantai Somalia, dimana kapal dan awak Cina dilecehkan oleh bajak laut disana. Cina juga telah memulai sebuah program untuk membangun dan memperoleh persenjataan yang lebih canggih termasuk jet tempur J-20 yang melakukan uji terbang di tahun sebelumnya, dan kapal induk pertama Cina yang telah diperbaharui.⁶⁶

Menurut kantor berita negara Cina, anggaran pertahanan Cina tumbuh dari 12,7% pada tahun 2011, 11,2%

⁶⁴ Keith B. Richburg, "*China's military spending to top \$100 billion in 2012*" dalam https://www.washingtonpost.com/world/china-military-spending-to-top-100-billion-this-year/2012/03/04/gIQAJRnypR_story.html?utm_term=.0aecefae4035, diakses pada 7 Maret 2018.

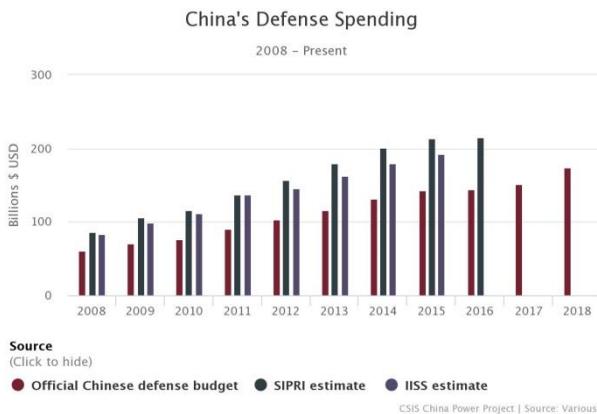
⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

pada tahun 2012, dan 10,7% pada tahun 2013.⁶⁷ Berikut adalah grafik pembelanjaan pertahanan Cina:

Gambar 3.1

Grafik Pembalajaan Pertahanan Cina



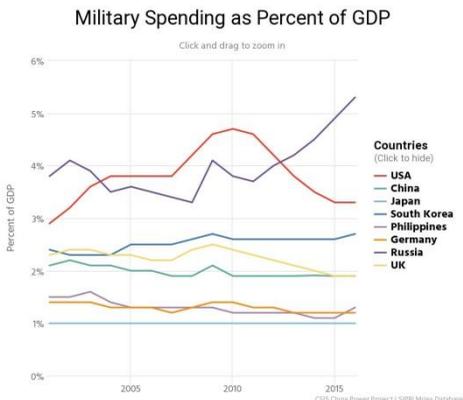
Sumber: China Power, “What does China really spend on its military?”

Dan berikut adalah grafik belanja militer dalam persen dari PDB Cina:

⁶⁷ Katie Hunt. Loc. Cit.

Gambar 3.2

Grafik Belanja Militer dari PDB Cina



Sumber: China Power, “What does China really spend on its military?”

C. Konflik Cina dan Filipina di Perbatasan

Klaim nine dash line oleh Cina menunjukkan keagresifannya dalam persengketaan Laut Cina Selatan yang menegaskan kedaulatannya atas pulau-pulau yang berada dalam ZEE Filipina. Klaim tersebut mencapai 90% dari Laut Cina Selatan yang tumpang tindih 80% dari ZEE Filipina. Klaim ini membuat Filipina kehilangan 80% ZEE nya di Laut Filipina Barat.

Laut Cina Selatan mencakup beberapa ratus pulau-pulau kecil, atol, dan terumbu karang di area seluas 1,4 juta mil persegi.⁶⁸ Oleh karena itu, Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis dengan sumber daya yang melimpah.

⁶⁸ Jeffrey A. Bader, “*The U.S and China’s Nine Dash Line: Ending the Ambiguity*” dalam <https://www.brookings.edu/opinions/the-u-s-and-chinas-nine-dash-line-ending-the-ambiguity/> , diakses pada 10 Maret 2018.

Hal inilah yang membuat wilayah ini diperebutkan. Begitu pula dengan kepentingan Cina di perairan ini, selain alasan historis alasan ini menjadi kepentingan Cina untuk memiliki sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Hal ini membuat Cina semakin agresif untuk mencapai kepentingan tersebut dengan cara menghadirkan militernya dan melakukan patroli di wilayah tersebut. Setelah mengeluarkan klaim nine dash line pada 2009, Cina mulai meningkatkan kehadiran militernya pada 2010.

Keagresifan Cina di perbatasan Filipina mulai terjadi pada 2011. Peningkatan kehadiran Cina tersebut menyebabkan terjadi beberapa serangan di perairan perbatasan Filipina. Pada tanggal 25 Februari 2011, 3 kapal penangkap ikan milik Filipina yaitu F/V Jaime DLS, F/V Mama Lydia DLS dan F/V Maricris 12 beroperasi di perairan lepas landas Jackson 140 mil dari Laut Barat Filipina. Menurut laporan dari Angkatan Bersenjata Filipina, kapal Cina mendekati kapal penangkap ikan Filipina dan mengusir serta mengancam akan menembak. Saat kapal Filipina mulai menarik diri, kapal Cina melepaskan tiga tembakan yang mendarat 0,3 mil (556 meter) dari kapal F/V Maricris 12. Setelah 3 hari bersilang, pada tanggal 28 Februari Filipina mendapati tiga kapal penangkap ikan Cina yang mengeksploitasi sumber daya kelautan di daerah tersebut.⁶⁹

Pada bulan berikutnya pada tanggal 2 Maret, 2 kapal patroli Cina No.71 dan No.75 membubarkan dan mengancam akan menabrak sebuah kapal survei energi milik Perancis yaitu MV Veritas Voyager yang mempunyai kontrak eksplorasi oleh Filipina yang sedang melakukan tes di ladang minyak dan gas di Pulau Palawan. Dalam hal ini, Filipina merespon dengan

⁶⁹ Carlyle A. Thayer, *“China’s New Wave of Aggressive Assertiveness in the South China Sea”* dalam <https://www.csis.org/analysis/china%E2%80%99s-new-wave-aggressive-assertiveness-south-china-sea> , diakses pada 10 Maret 2018.

mengirimkan 2 pesawat perang ke daerah tersebut untuk menyelidiki dan mendorong kapal-kapal Cina untuk pergi.⁷⁰

Kejadian berikutnya terjadi pada 6 Mei 2011, terdapat sebuah kapal laut milik Cina terlihat di Dangkanan Abad Santos.⁷¹ Lalu pada 24 Mei, nelayan Filipina melaporkan adanya sebuah kapal pengawas maritim Cina dan kapal-kapal PLAN yang menurunkan muatan baja, bahan bangunan dan pelampung di dekat Likas dan Patag yang berada di sekitar 100 mil dari Palawan.⁷²

Pada 2012, sebagian besar keagresifan China terjadi di Dangkanan Scarborough. Dangkanan Scarborough ini terdiri dari rangkaian terumbu karang, bebatuan dan ulau-pulau kecil yang berada disekitar 150 mil dari Filipina dan berjarak lebih dari 600 mil dari Cina.⁷³

Pada tanggal 10 April 2012, konflik antara China dan Filipina kembali terjadi ketika sebuah kapal fregat Angkatan Laut Filipina menyelidiki adanya delapan kapal nelayan China di Dangkanan Scarborough. Filipina menemukan salah satu kapal yang berisi sejumlah besar kerang raksasa, hiu hidup dan

⁷⁰ BBC, “*Philippines halts tests after China patrol challenge*” dalam <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12672889> , diakses pada 10 Maret 2018.

⁷¹ Tessa jamandre, “*China fired at Filipino fishermen in Jackson atoll*” dalam <http://www.gmanetwork.com/news/news/specialreports/222519/china-fired-at-filipino-fishermen-in-jackson-atoll/story/> , diakses pada 10 Maret 2018.

⁷² Carlyle A. Thayer, Loc. Cit.

⁷³ Frank Langfitt “*China, Philippines Face Off Over Remote Islands*” dalam <https://www.npr.org/2012/05/29/153921020/china-philippines-faceoff-over-remote-islands> , diakses pada 12 Maret 2018.

karang yang diduga dipanen di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.⁷⁴

Pada 11 April, Angkatan Laut Filipina mengerahkan kapal perang terbesarnya yaitu BRP Gregorio Del Pilar setelah mengidentifikasi adanya kapal penangkap ikan Cina di Dangkanan Scarborough. Cina pun mengirimkan kapal pengintai sebagai tanggapan dan memperingatkan Angkatan Laut Filipina untuk meninggalkan daerah tersebut.⁷⁵ Filipina juga mengatakan Cina masih memiliki lebih dari 30 kapal di daerah Dangkanan Scarborough, tujuh diantaranya adalah kapal penangkap ikan, dua kapal pengangkut, dan satu kapal perang. Sebelum dilakukannya penyitaan kapal, dua kapal pengawas Cina mendekat dan menempatkan diri di antara kapal-kapal Filipina dan kapal penangkap ikan Cina. Cina dan Filipina terus berusaha melakukan diplomasi namun malah lebih banyak kapal perang yang dikerahkan oleh kedua pemerintah.⁷⁶

Pada 12 April, Filipina menari kapal perang nya dan Cina kembali mengirimkan kapal ketiga ke daerah tersebut. Pada 14 April, 7 kapal penangkap ikan Cina dan 1 kapal survei meninggalkan Dangkanan Scarborough yang diduga panen illegal dari spesies yang terancam punah.⁷⁷

⁷⁴ Carlyle Thayer, "*The China-Philippines Face Off at Scarborough Shoal: Back to Square One?*" dalam <http://www.e-ir.info/2012/04/26/the-china-philippines-face-off-at-scarborough-shoal-back-to-square-one/>, diakses pada 12 Maret 2018.

⁷⁵ Rappler, "*TIMELINE: The Philippines-China Maritime Dispute*" dalam <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/139392-timeline-west-philippine-sea-dispute>, diakses pada 12 Maret 2018.

⁷⁶ Daniel Wagner, Edsel Tupaz, dan Ira Paulo Pozon "*China, the Philippines, and the Scarborough Shoal*" dalam https://www.huffingtonpost.com/daniel-wagner/china-the-philippines-and_b_1531623.html, diakses pada 12 Maret 2018.

⁷⁷ Rappler, Loc. Cit.

Pada 18 Juli, Cina menyiapkan penghalang ke titik masuk Dangkan Scarborough untuk mencekal kapal militer dan kapal penangkap ikan Filipina masuk. Setelah kebuntuan selama 3 bulan antar kapal Filipina dan Cina di sekitar Dangkan Scarborough, Cina menginformasikan ke Filipina bahwa kapal penjaga pantai Cina akan tetap berada disana secara permanen dengan mengembangkan Sansha. Sansha adalah sebuah garnisun militer untuk Laut Cina Selatan yang disengketakan.⁷⁸

Pada tahun 2013, keagresifan Cina di perbatasan Filipina tetap terjadi walaupun tidak sebanyak tahun sebelumnya. Pada awal tahun 2013, Filipina mengajukan gugatan ke Pengadilan Permanen Arbitrase di Den Haag Belanda sebagai keputusan atas sikap Cina yang melakukan reklamasi tanah besar-besaran di Laut Filipina Barat di dekat Kepulauan Spratly yang mengubah terumbu karang yang terendam ke pulau-pulau buatan yang mampu menampung peralatan dan struktur militer.⁷⁹ Cina secara resmi menolak langkah Filipina untuk membawa masalah tersebut dan mengatakan bahwa klaim Filipina secara hukum lemah dan membawa tuduhan yang tidak dapat diterima oleh Cina.⁸⁰

Lalu pada 21 Mei 2013, Cina kembali hadir dan melakukan penangkapan ikan ilegal. Filipina mengkonfirmasi adanya kapal penangkap ikan Cina sekitar 30 kapal terlihat berada di Dangkan Ayungin, bagian dari Kelompok Pulau Kalayaan di lepas pantai Palawan. Sebelumnya Filipina telah mengajukan protes ke Kedutaan Besar Cina di Manila pada 10 Mei atas kehadiran provokatif dan ilegal kapal pemerintah China, dua kapal Pengintai Laut China (CMS) dan satu kapal perang, di sekitar kawasan. Filipina menyerukan kepada Cina

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Atty. Aurora A. Santiago, Loc. Cit.

⁸⁰ Carlos Santamaria, "*China rejects PH arbitration move*" dalam <https://www.rappler.com/nation/22152-china-rejects-ph-arbitration-move> , diakses pada 20 Maret 2018.

untuk menghormati hak berdaulat dan yurisdiksi Filipina di atas landas kontinennya termasuk perairan di sekitar Ayungin.⁸¹

Pada 7 Juni, Cina merilis peta baru China dengan menambahkan dasbor ke-10 di sisi timur Taiwan. China mengklaim garis 10-garis merupakan "batas-batas nasional", tanpa lagi menjelaskan dasar hukum atau memberikan koordinat tetap untuk garis-garis. Peta tersebut menampilkan 10 garis putus-putus alih-alih sembilan garis putus-putus untuk menandai petak besar Laut Cina Selatan dalam pengepungan berbentuk lidah sebagai wilayah China.⁸²

Berikut adalah peta baru Cina di Laut Cina Selatan:

⁸¹ Ace Tamayo, "30 Chinese vessels, 1 warship sighted in Palawan" dalam <https://www.rappler.com/nation/29682-chinese-vessels-sighted-in-palawan> , diakses pada 20 Maret 2018.

⁸² Michaela Del Callar, "China's new '10-dash line map' eats into Philippine territory" dalam <http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/319303/china-s-new-10-dash-line-map-eats-into-philippine-territory/story/> , diakses pada 20 Maret 2018.

Gambar 3.3

Peta 10 Dash Line Cina



Sumber: Australian Strategic Policy Institute, “China’s New Map: just another dash?”

Setelah itu pada 5 Juli, dua kapal pengawasan laut China (CMS) terlihat di dekat Dangkalán Panatag beberapa hari setelah meninggalkan daerah itu dari Zambales di Laut Filipina Barat. Kapal-kapal tersebut dikabarkan berada di sebelah timur dangkalan.⁸³

Lalu pada awal tahun 2014 tepatnya pada 1 Januari, Cina memberlakukan aturan izin penangkapan ikan di Laut Filipina Barat, sehingga kapal penangkap ikan asing perlu mendapat persetujuan dari otoritas regional Cina sebelum memancing atau melakukan survei di sebagian besar Laut

⁸³ Jaime Laude, “*Chinese ships back in Panatag?*” dalam <https://www.philstar.com/headlines/2013/07/09/963270/chinese-ships-back-panatag> , diakses pada 20 Maret 2018.

Cina Selatan.⁸⁴ Pada 27 Januari, kapal penjaga pantai Cina mengusir kapal penangkap ikan Filipina dengan menggunakan meriam air di Dangkalán Panatag. Insiden itu terjadi seiring dengan pemberlakuan undang-undang baru oleh Cina yang mengharuskan nelayan asing untuk mencari izin negara untuk memancing di daerah tersebut.⁸⁵

Pada bulan Maret, konflik terjadi di Dangkalán Ayungin. Pada tanggal 10 Maret, Cina mengusir dua kapal Filipina dari dekat daerah Dangkalán Ayungin yang berada disekitar 120 mil dari Pulau Palawan.⁸⁶ Lalu pada 29 Maret, Cina melecehkan kapal Filipina di Dangkalán Ayungin yang direspon dengan kecaman oleh Filipina. Pelecehan dilakukan oleh penjaga pantai Cina kepada kapal-kapal sipil Filipina yang bertujuan ke Dangkalán Ayungin untuk memasok pasokan ke personel Filipina yang ditempatkan disana. Filipina pun menekankan bahwa Dangkalán Ayungin merupakan bagian dari landas kontinen Filipina sehingga Filipina memiliki hak berdaulat dan yuridiksi atasnya dan menuntut Cina untuk menghentikan tindakan yang merupakan ancaman terhadap keamanan Filipina.⁸⁷

Pada 6 Mei, dua kapal Cina ditemukan di Dangkalán Hasa-Hasa yang berjarak hanya 60 mil dari pantai Palawan. Berdasarkan keterangan yang dilaporkan Filipina, kapal

⁸⁴ Paterno Esmaguél II, “*PH slams China law on fishing boats*” dalam <https://www.rappler.com/nation/47665-philippines-china-hainan-fisheries-law> , diakses pada 20 Maret 2018.

⁸⁵ Carmela Fonbuena, “*AFP Chief: Chinese used water cannons vs Filipino Fishermen*” dalam <https://www.rappler.com/nation/51394-china-drove-away-filipino-fishermen-panatag> , diakses pada 20 Maret 2018.

⁸⁶ Rappler, “*China Drief Away PH Ships from Shoal*” dalam <https://www.rappler.com/nation/52653-xinhua-china-philippines-ships> , diakses pada 20 Maret 2018.

⁸⁷ Paterno Esmaguél II, “*China harrasses PH ship before pleading day*” dalam <https://www.rappler.com/nation/54192-china-harasses-philippine-ship-memorial> , diakses pada 21 Maret 2018.

tersebut membawa 11 orang awak kapal dan kurang lebih 500 ekor kura-kura.⁸⁸ Lalu pada 14 Mei, Filipina mengkonfirmasi adanya pembangunan Cina yang sedang berlangsung di *Mabini Reef (Johnson Reef)* di Laut Filipina Barat.⁸⁹

Lalu pada 20 April 2015, Cina melakukan reklamasi terumbu karang Mischief (Panganiban) menjadi stasiun Angkatan Laut. Karang Mischief berada di dalam zona ekonomi eksklusif 200 nautical mil negara Filipina, berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Reklamasi ini memangkas akses Filipina ke beberapa wilayah termasuk Dangkanan Ayungin, karena karang tersebut berjarak hanya 23 mil laut dari Dangkanan Ayungin, di mana Filipina membumi sebuah kapal yang dijadikan sebagai pos angkatan laut yang tidak konvensional yang diawaki oleh beberapa Marinir Filipina.⁹⁰ Dan pada 20 September, Cina menyelesaikan landasan 3.125 meter di Karang Fiery Cross yang juga diklaim oleh Filipina.⁹¹ Kelanjutan dari reklamasi di Karang Mischief dapat dilihat pada Januari 2016 dengan adanya laporan bahwa Cina sedang membangun pelabuhan bawah laut di daerah tersebut.⁹²

⁸⁸ Carmela Fonbuena, “*PH arrests 11 Chinese Fishermen off Palawan*” dalam <https://www.rappler.com/nation/57456-missing-chinese-fishermen-half-moon-shoal> , diakses pada 21 Maret 2018.

⁸⁹ Carmela Fonbuena, “*China constructing in West Philippine Sea*” dalam <https://www.rappler.com/nation/58007-ph-confirms-china-construction-south-china-sea> , diakses pada 21 Maret 2018.

⁹⁰ Carmela Fonbuena, “*China reclamation may cut PH access to West PH Sea*” dalam <https://www.rappler.com/nation/90469-mischief-reef-reclamation-big-problem> , diakses pada 21 Maret 2018.

⁹¹ Rappler, Loc. Cit.

⁹² Jaime Laude, “*China building submarine base in Panganiban Reef*” dalam <https://www.philstar.com/headlines/2016/01/06/1540057/china-building-submarine-base-panganiban-reef> , diakses pada 21 Maret 2018.